

**PENGARUH ISTILAH ASING TERHADAP PERKEMBANGAN ISTILAH KELAUTAN
DALAM BAHASA INDONESIA DI SARANG TIUNG**

**Maulida Muthmai'nah, Rusma Noortyani, Muhammad Erwin, Muhammad Zaini Rafli,
Lyra Rafika Fajriana, Cahya Safitri**

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Lambung Mangkurat

Email : 2510717320019@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh penggunaan istilah asing terhadap perkembangan istilah kelautan dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ilmu kelautan yang pesat, terutama dalam konteks globalisasi, telah memperkenalkan banyak istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan memeriksa berbagai referensi dan literatur terkait serta data dari media cetak dan digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa istilah asing memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan istilah kelautan dalam bahasa Indonesia, meskipun demikian, penggunaan istilah asing ini juga menyebabkan pergeseran makna dan kurangnya keseragaman dalam penggunaan istilah kelautan dalam masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan usaha lebih untuk memformulasikan istilah kelautan yang tepat dan dapat diterima secara luas dalam bahasa Indonesia.

Kata Kunci : Bahasa Indonesia, Istilah asing, Kelautan, Pengaruh

Abstract

This study aims to identify the influence of foreign terms on the development of maritime terminology in Indonesian. The rapid development of marine science, especially in the context of globalization, has introduced many foreign terms into the Indonesian language. This research uses a descriptive qualitative analysis method by examining various relevant references and literature, as well as data from print and digital media. The results show that foreign terms have contributed significantly to the formation of maritime terminology in Indonesian. However, this also leads to a shift in meaning and a lack of uniformity in the use of maritime terms within the academic community. Therefore, further efforts are needed to formulate appropriate maritime terms that are widely accepted in Indonesian.

Keywords : Indonesian language, Foreign terms, Maritime, Influence

PENDAHULUAN

Perkembangan istilah kelautan dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah proses yang kompleks dan dinamis, terutama dalam konteks globalisasi yang kian mendalam. Globalisasi telah membuka akses terhadap berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi baru,

termasuk dalam bidang kelautan. Dalam proses ini, bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi alat utama dalam transfer ilmu pengetahuan (Crystal, 2003). Kondisi ini memperlihatkan bahwa bahasa berfungsi bukan hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen penguasaan ilmu pengetahuan. Semakin cepat arus globalisasi, semakin besar pula arus masuk istilah-istilah asing yang tidak hanya mengubah kosakata teknis, melainkan juga cara berpikir masyarakat dalam memandang kelautan dan sumber daya laut. Pengaruh bahasa Inggris sebagai bahasa dominan dalam publikasi ilmiah dan teknologi berdampak pada masuknya istilah-istilah kelautan asing ke dalam bahasa Indonesia (Mulyani, 2022).

Sarang Tiung, yang terletak di kawasan pesisir, merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor perikanan. Istilah-istilah dalam dunia kelautan, seperti "keanekaragaman hayati laut", "perikanan berkelanjutan", dan "ekosistem laut", sering ditemukan dalam komunikasi sehari-hari, baik di kalangan nelayan, pelaku usaha kelautan, maupun dalam kebijakan pemerintah. Tantangan ini semakin terlihat ketika istilah-istilah tersebut dihadapkan pada realitas masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan akses pendidikan formal. Dengan demikian, meskipun Sarang Tiung memiliki potensi alam yang besar, kemampuan masyarakatnya dalam memahami istilah teknis sering tertinggal dari kebijakan dan wacana akademik. Penggunaan istilah asing dalam bahasa Indonesia sangat luas, terutama dalam bidang teknis dan ilmiah, yang mengarah pada kesulitan pemahaman di kalangan masyarakat awam, terutama di daerah-daerah pesisir yang bergantung pada sektor kelautan (Prabowo, 2021).

Istilah kelautan yang berasal dari bahasa asing sering kali diadopsi secara langsung tanpa melalui proses penerjemahan atau adaptasi yang memadai. Ketika istilah tersebut digunakan dalam kebijakan atau dokumen resmi, masyarakat umum—terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi—sering mengalami kesulitan dalam memahaminya. Hal ini menimbulkan konsekuensi serius, yaitu terhambatnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan yang seharusnya berdampak langsung pada kehidupan mereka. Jarak linguistik ini juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial antara pihak yang menguasai bahasa ilmiah dengan masyarakat pesisir yang berinteraksi langsung dengan laut setiap harinya. Ketergantungan terhadap istilah asing ini menciptakan jarak antara ilmu pengetahuan dan masyarakat (Prabowo, 2021).

Dalam konteks kebijakan kelautan nasional, istilah seperti marine biodiversity, sustainable fisheries, dan marine ecosystem semakin sering digunakan, bahkan dalam dokumen kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat umum. Penggunaan istilah teknis yang berasal dari bahasa asing ini menimbulkan kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan masyarakat pesisir. Akibatnya, kebijakan yang disusun dengan baik di tingkat pusat sering kali gagal mencapai efektivitasnya di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa bahasa bukan sekadar sarana teknis, tetapi juga jembatan penting untuk menjamin keberhasilan kebijakan publik, khususnya dalam bidang kelautan yang sarat dengan konsep ilmiah. Sebagian besar masyarakat Sarang Tiung belum sepenuhnya memahami makna istilah tersebut karena keterbatasan akses pendidikan dan kurangnya penerjemahan istilah dalam konteks lokal (Prabowo, 2021).

Dalam dunia pendidikan pun, permasalahan yang sama muncul. Materi pembelajaran kelautan di tingkat sekolah seringkali mengadopsi istilah asing tanpa penjelasan kontekstual yang sesuai. Di Sarang Tiung, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan tradisional, dan anak-anak mereka memiliki akses terbatas ke pendidikan tinggi. Akibatnya, istilah dalam buku pelajaran seperti aquaculture, overfishing, dan marine protected area tidak dimengerti dengan baik, bahkan oleh guru-guru di tingkat sekolah dasar dan menengah (Mulyani, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa hambatan bahasa bukan hanya dialami oleh masyarakat awam, tetapi juga tenaga pendidik yang menjadi garda depan dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Kekurangan pemahaman ini menimbulkan efek domino, yaitu terbatasnya literasi kelautan generasi muda yang seharusnya menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya laut di masa depan. Dari sisi kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri mulai menyadari pentingnya pendekatan bahasa yang lebih inklusif. Beberapa inisiatif dilakukan untuk menyederhanakan istilah teknis dalam program seperti Kampung Nelayan Maju dan Kawasan Konservasi Laut Daerah. Namun, efektivitasnya masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama sejauh mana istilah-istilah yang digunakan benar-benar dipahami oleh masyarakat pesisir seperti di Sarang Tiung (KKP, 2024).

Meskipun program-program ini memberikan arah positif, terdapat tantangan besar dalam implementasi di lapangan, karena istilah-istilah teknis sering kali masih menggunakan kosakata ilmiah yang jauh dari keseharian masyarakat. Perlu adanya mekanisme evaluasi partisipatif yang mengukur tingkat pemahaman warga terhadap bahasa kebijakan agar program

tersebut tidak hanya berhenti di tataran konsep. Sebagian besar masyarakat Sarang Tiung, terutama nelayan dan keluarga nelayan, tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang istilah teknis kelautan yang sering kali berasal dari bahasa asing. Bahkan, beberapa istilah yang digunakan dalam kebijakan kelautan sering kali tidak dipahami dengan baik oleh mereka yang bekerja di sektor perikanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebijakan yang diterapkan di tingkat pemerintah dan pemahaman masyarakat lokal. Kebijakan kelautan yang mengadopsi istilah asing tanpa penjelasan yang jelas dapat menyebabkan kebingungan masyarakat lokal, yang akhirnya menghambat implementasi kebijakan tersebut (Subhan, 2021).

Dalam dunia pendidikan, keberadaan istilah asing dalam materi pembelajaran kelautan di Indonesia juga menghadirkan tantangan. Di Sarang Tiung, masyarakat lokal yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan tradisional, tidak memperoleh akses yang cukup terhadap pendidikan tinggi di bidang kelautan. Oleh karena itu, banyak istilah asing dalam literatur kelautan yang tidak dipahami oleh masyarakat, yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang konsep-konsep penting dalam konservasi laut, perikanan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya laut secara bijaksana. Pendidikan tentang kelautan harus diimbangi dengan pemahaman istilah lokal yang lebih mudah diakses oleh masyarakat pesisir (Mulyani, 2022). Masalah-masalah yang timbul akibat penggunaan istilah asing dalam kebijakan kelautan dan komunikasi ilmiah harus ditangani dengan serius. Salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan terjemahan istilah asing yang lebih mudah dipahami tanpa mengurangi makna teknisnya. Penciptaan padanan yang relevan dengan konteks lokal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program konservasi kelautan (Supriyadi, 2022).

Penelitian yang berfokus pada hal ini menjadi dasar untuk merumuskan strategi komunikasi kebijakan yang lebih efektif, termasuk melalui sosialisasi dengan bahasa sederhana. Lebih dari sekadar penerjemahan, pendekatan budaya juga penting untuk menghubungkan istilah teknis dengan kearifan lokal. Misalnya, konsep sustainable fishing dapat dikaitkan dengan praktik lokal seperti pukut harimau yang dilarang karena merusak ekosistem laut. Dengan mengaitkan istilah asing dengan narasi lokal, pemahaman masyarakat akan meningkat dan partisipasi mereka dalam konservasi akan lebih aktif. Hal ini membuktikan bahwa bahasa tidak hanya dipahami sebagai simbol teknis, tetapi juga sebagai jembatan nilai

antara tradisi lokal dan sains modern. Jika praktik konservasi dapat diceritakan dalam kerangka budaya lokal, maka resistensi masyarakat akan jauh berkurang (Nugroho & Wibowo, 2023).

Data dianalisis dengan teknik analisis isi, yang menekankan pada identifikasi istilah asing, klasifikasi berdasarkan tingkat pemahaman, dan kontekstualisasi dalam kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak langsung penggunaan istilah asing terhadap pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan laut. Misalnya, istilah seperti *marine spatial planning* (perencanaan ruang laut) sering kali tidak dipahami secara utuh dan justru menimbulkan resistensi masyarakat karena dianggap membatasi akses mereka ke laut (Supriyadi, 2022). Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya keterhubungan antara terminologi teknis dengan realitas sosial masyarakat pesisir agar kebijakan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga diterima secara praktis di lapangan. Tentu saja, upaya ini memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan kelautan yang diterapkan di tingkat daerah memiliki komponen edukasi bahasa yang kuat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui poster atau media sosial, tetapi juga dalam bentuk dialog interaktif, diskusi kelompok, dan pelatihan langsung menggunakan bahasa lokal atau bahasa Indonesia yang telah disederhanakan secara makna (KKP, 2024).

Dalam konteks global, tantangan penggunaan istilah asing dalam sektor kelautan tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara berkembang dengan komunitas pesisir yang kuat juga menghadapi hambatan serupa. Hal ini menunjukkan Penggunaan istilah teknis dalam dokumen konservasi laut di Brasil, misalnya, telah menimbulkan kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan nelayan lokal, sehingga membatasi efektivitas program konservasi berbasis masyarakat. Fenomena serupa juga dapat ditemui di Filipina dan Afrika, di mana bahasa kolonial masih digunakan dalam kebijakan resmi, sedangkan masyarakat pesisir lebih mengandalkan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari. bahwa persoalan linguistik dalam kebijakan kelautan merupakan isu global yang membutuhkan solusi lintas negara (Fernandez & Lemos, 2021). Dalam jangka panjang, penguatan literasi kelautan berbasis bahasa lokal akan meningkatkan kedaulatan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya laut mereka. Masyarakat yang memahami kebijakan dan konsep teknis akan lebih mampu menilai, menyesuaikan, dan bahkan mengembangkan kebijakan lokal yang berbasis

pada kebutuhan dan potensi mereka sendiri. Ini sejalan dengan prinsip *community-based marine management* yang saat ini banyak diterapkan secara global (Agustina & Sari, 2023).

Isu literasi kelautan juga menjadi perhatian penting dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Literasi kelautan tidak hanya mencakup kemampuan membaca informasi, tetapi juga pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam kebijakan dan ilmu kelautan. Kebutuhan untuk memperkenalkan istilah yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat menjadi krusial dalam memperkuat partisipasi mereka dalam pengelolaan laut (Widodo, 2023). Tanpa literasi yang memadai, masyarakat akan kesulitan memahami keterkaitan antara aktivitas mereka dengan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya pada pilar kehidupan bawah laut (SDG 14).

Literasi kebijakan di kalangan masyarakat nelayan menjadi elemen penting dalam keberhasilan pelaksanaan regulasi kelautan. Penggunaan bahasa hukum dan teknis dalam peraturan perundang-undangan sering kali menjadi penghambat utama bagi pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan translasi budaya dalam penyampaian kebijakan kelautan agar dapat diterima dan dipahami secara utuh oleh masyarakat (Haris & Suryani, 2022). Translasi budaya ini tidak hanya berarti menerjemahkan bahasa, tetapi juga menyesuaikan cara penyampaian dengan pola pikir masyarakat pesisir yang lebih mengedepankan praktik langsung dan pengalaman nyata daripada penjelasan teoretis yang abstrak. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu masyarakat pesisir dalam memahami istilah asing. Aplikasi edukatif berbasis lokal yang dikembangkan dengan konten visual, audio, dan bahasa daerah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman nelayan muda tentang istilah kelautan, seperti yang ditunjukkan oleh studi di pesisir Jawa Barat (Fadhilah & Irwansyah, 2024).

Teknologi ini memberikan alternatif pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan media digital memungkinkan transfer pengetahuan berlangsung secara cepat dan meluas, meskipun dengan keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah pesisir. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan nilai dan identitas masyarakat. Oleh karena itu, istilah asing yang digunakan dalam kebijakan harus dikaji dari perspektif budaya agar tidak menimbulkan konflik makna atau

penolakan oleh masyarakat lokal yang memiliki cara pandang berbeda terhadap laut dan sumber dayanya. Laut, dalam banyak budaya pesisir, dipandang bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang spiritual dan identitas kolektif. Jika bahasa kebijakan mengabaikan aspek ini, maka istilah asing yang digunakan dapat dianggap asing secara emosional dan menimbulkan resistensi budaya (Nasution, 2021).

Institusi pendidikan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk mendekatkan bahasa akademik dengan bahasa rakyat. Dengan mengembangkan glosarium dwibahasa kelautan yang dapat diakses masyarakat pesisir, institusi akademik dapat membantu menjembatani kesenjangan informasi dan memperkuat literasi kebijakan berbasis komunitas (Wahyuni & Askar, 2022). Glosarium ini berfungsi sebagai alat praktis yang dapat digunakan baik oleh guru, mahasiswa, maupun nelayan dalam memahami istilah-istilah teknis yang sering muncul dalam wacana kebijakan. Selain itu, kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan komunitas lokal dapat memastikan bahwa glosarium tersebut tidak hanya akurat secara akademik, tetapi juga relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Keseluruhan persoalan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kelautan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan pendekatan ilmiah dan teknis, tetapi juga pendekatan linguistik dan budaya. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan padanan istilah yang kontekstual akan menciptakan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pelestarian laut (Agustina & Sari, 2023).

Dengan adanya kesepahaman bahasa, program konservasi dapat berjalan lebih efektif karena masyarakat merasa memiliki pengetahuan yang cukup untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya laut, bukan sekadar objek dari kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kelautan yang diterapkan di wilayah pesisir, khususnya di Sarang Tiung, Kotabaru. Sebagai daerah yang sangat bergantung pada sumber daya alam kelautan, masyarakat pesisir perlu diberdayakan agar bisa berperan aktif dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya laut. Salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk memperkuat peran masyarakat pesisir dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut mereka. Dalam jangka

panjang, pendekatan berbasis bahasa lokal dapat menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa kebijakan kelautan berjalan efektif dan berkeadilan (Santoso, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, khususnya pengaruh penggunaan istilah asing dalam perkembangan istilah kelautan dalam bahasa Indonesia di Sarang Tiung, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi, pengalaman, dan pandangan masyarakat terhadap penggunaan istilah asing dalam komunikasi kelautan dan kebijakan kelautan yang diterapkan di daerah tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional. Teknik penggunaan data sekunder dapat dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis dokumen atau teks yang telah ada, untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan istilah-istilah asing yang digunakan dalam kebijakan kelautan, serta melihat bagaimana istilah tersebut memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan kelautan (Krippendorff, 2018).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan istilah asing dalam kebijakan kelautan yang diterapkan di Sarang Tiung, Kotabaru menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemahaman masyarakat lokal. Sebagian besar masyarakat pesisir kesulitan untuk memahami istilah-istilah asing yang digunakan dalam dokumen kebijakan kelautan. Hal ini terjadi karena istilah asing tersebut belum sepenuhnya disosialisasikan atau disesuaikan dengan bahasa sehari-hari masyarakat setempat. Sebagai contoh, istilah-istilah teknis seperti "sustainable fisheries" (perikanan berkelanjutan) dan "marine biodiversity" (keanekaragaman hayati laut) seringkali tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat yang hanya menguasai bahasa daerah dan bahasa Indonesia standar (Setiawan & Rahmawati, 2021). Masyarakat pesisir Sarang Tiung banyak bergantung pada sektor perikanan tradisional yang telah berlangsung turun-temurun. Hal ini menjadi masalah karena tanpa penguasaan bahasa yang memadai, masyarakat

sulit mengadopsi kebijakan dan teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya laut (Prabowo, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Sarang Tiung cenderung lebih mudah memahami istilah kelautan yang telah disesuaikan dengan bahasa sehari-hari atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana. Misalnya, istilah "mangrove restoration" lebih mudah dipahami ketika diterjemahkan menjadi "pemulihan mangrove", dibandingkan dengan istilah asing yang hanya disebutkan dalam bahasa aslinya. Penggunaan istilah yang lebih relevan dengan konteks lokal mempermudah masyarakat untuk lebih memahami tujuan dan pentingnya kebijakan kelautan yang diterapkan (Haryanto, 2020). Salah satu penyebab utama dari kesenjangan ini adalah terbatasnya akses pendidikan formal bagi masyarakat pesisir, khususnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Banyak dari mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar hingga tingkat menengah, sehingga sulit memahami istilah-istilah asing yang kompleks. Akibatnya, masyarakat hanya menerima informasi secara parsial tanpa pengertian penuh akan maknanya (Mulyani, 2022).

Penggunaan istilah asing dalam kebijakan kelautan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program kelautan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat yang kesulitan memahami istilah teknis cenderung kurang berpartisipasi dalam program yang berkaitan dengan konservasi laut atau pengelolaan sumber daya kelautan. Misalnya, ketika pemerintah mempromosikan konservasi terumbu karang menggunakan istilah asing yang rumit, masyarakat merasa terasing dan kurang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, ketika kebijakan tersebut disampaikan dengan istilah yang lebih mudah dimengerti, partisipasi masyarakat dapat meningkat (Raharjo & Santoso, 2020). Kesenjangan pemahaman ini secara langsung berdampak pada pelaksanaan kebijakan kelautan di tingkat lokal. Ketika masyarakat tidak memahami istilah-istilah kunci dalam kebijakan, mereka cenderung tidak ikut serta atau bahkan menolak program-program yang sebenarnya bertujuan melindungi sumber daya laut. Hal ini menyebabkan konflik antara aparat pemerintah dan masyarakat nelayan (Supriyadi, 2022).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam penyuluhan kebijakan kelautan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sosialisasi kebijakan. Masyarakat lebih menerima informasi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam komunikasi langsung. Oleh karena

itu, penting bagi pemerintah atau pihak yang mengimplementasikan kebijakan kelautan untuk menyesuaikan bahasa yang digunakan agar dapat dipahami oleh masyarakat lokal tanpa menimbulkan kesalahpahaman (Moleong, 2017). Media lokal dan proses sosialisasi memiliki peran vital dalam menjembatani kesenjangan ini. Sayangnya, banyak media yang hanya menerjemahkan secara literal istilah asing tanpa penyesuaian budaya. Sosialisasi kebijakan juga sering dilakukan secara satu arah tanpa dialog interaktif yang bisa membantu masyarakat memahami secara lebih baik. Keterlibatan media dan metode sosialisasi yang partisipatif sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan pemahaman ini (KKP, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan bahasa ini, dibutuhkan pengembangan padanan istilah dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks lokal. Istilah-istilah kelautan perlu disesuaikan dengan budaya dan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti. Contohnya, *sustainable fishing* dapat diterjemahkan menjadi “menangkap ikan secukupnya agar laut tetap lestari,” yang lebih mudah diterima oleh nelayan tradisional (Nugroho & Wibowo, 2023). Penelitian juga menemukan adanya perbedaan pemahaman terhadap istilah kelautan yang dipengaruhi oleh usia dan tingkat pendidikan. Masyarakat yang lebih muda dan berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih mampu memahami istilah asing yang digunakan dalam kebijakan kelautan. Sementara itu, masyarakat yang lebih tua dan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah tersebut, bahkan jika istilah tersebut sudah diterjemahkan (Mulyono, 2019).

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh istilah asing terhadap perkembangan istilah kelautan dalam bahasa Indonesia di Sarang Tiung, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah asing dalam kebijakan kelautan mempengaruhi pemahaman masyarakat lokal, terutama mereka yang lebih terbiasa dengan bahasa Indonesia standar atau bahasa lokal. Masyarakat yang tidak familiar dengan istilah asing kesulitan memahami kebijakan kelautan, yang berdampak pada rendahnya partisipasi mereka dalam program konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan istilah tersebut dengan bahasa yang lebih sederhana dan relevan dengan konteks lokal untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini memberikan manfaat dalam merancang kebijakan kelautan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal, serta memperkuat sosialisasi kebijakan dan keberhasilan konservasi di wilayah pesisir. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan mengeksplorasi faktor-faktor sosial-ekonomi yang mungkin berdampak pada komunikasi kebijakan kelautan. Sebagai rekomendasi, pemerintah disarankan untuk menyederhanakan istilah asing dalam kebijakan kelautan dan menggunakan bahasa yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan informasi secara menarik dan mudah dipahami juga dapat mempercepat proses sosialisasi kebijakan kelautan. pengembangan padanan istilah kelautan yang relevan secara budaya dan kontekstual sangat penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Selain itu, pendekatan bahasa yang inklusif dan penggunaan metode sosialisasi yang interaktif dan partisipatif, termasuk media lokal dan teknologi digital, dapat meningkatkan literasi kelautan masyarakat pesisir. Pendidikan yang lebih mudah dipahami dengan materi yang disesuaikan konteks lokal juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan kelautan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustawan, D. M. (2022–2023). Pengaruh kata serapan bahasa Belanda dan Portugis terhadap struktur dan leksikal bahasa Manado. *Journal of Linguistics and Language Teaching*.
- Agustina, D., & Sari, M. (2023). Peran literasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Maritim*, 5(2), 114–128.
- Crystal, D. (2003). *English as a global language* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Fadhilah, R., & Irwansyah, A. (2024). Pemanfaatan teknologi digital untuk edukasi istilah kelautan di kalangan nelayan muda. *Jurnal Komunikasi Maritim dan Pesisir*, 6(1), 45–58.
- Fernandez, D., & Lemos, M. C. (2021). The role of language in community-based marine conservation: A comparative study in the Global South. *Marine Policy*, 132, 104681. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104681>
- Hadi, S., Chamamah, S., Ramlan, M., & Wijana, I. D. P. (2012). Perubahan fonologis kata-kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. *Humaniora*, 24(1), 64–76. <https://doi.org/10.22146/jh.v24i1.780>
- Haris, R., & Suryani, L. (2022). Translasi budaya dalam penyampaian kebijakan kelautan: Studi kasus masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Kelautan Indonesia*, 12(1), 77–89.

- Haryanto, I. (2020). Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan kelautan: Sebuah perspektif linguistik. *Jurnal Lingua Maritim*, 4(1), 123–134.
- Jannah, R., & Herdah. (2022). Kata serapan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia: Pendekatan leksikografi. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 215–223.
- KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). (2024). Program Kampung Nelayan Maju dan Evaluasi Pemahaman Istilah Teknis Kelautan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- Maulana, R., & Hanifa, F. (2022–2023). Analisis penggunaan kata serapan bahasa Inggris dalam percakapan mahasiswa. *ALDILAL: Jurnal Ilmu-Ilmu Kebahasaan*, 2(2), 102–113.
- Meysitta, L. (n.d.). Perkembangan kosakata serapan bahasa asing dalam KBBI. BAPALA. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/23982>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosda Karya.
- Mulyani, S. (2022). Tantangan literasi istilah kelautan dalam pendidikan formal masyarakat pesisir. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir*, 4(3), 132–146.
- Mulyono, A. (2019). Faktor sosial dalam pengelolaan kebijakan kelautan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Lingkungan*, 13(2), 91–100.
- Nasution, F. (2021). Makna laut dalam budaya masyarakat pesisir: Sebuah tinjauan etnolinguistik. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 200–212.
- Nugroho, A., & Wibowo, D. (2023). Integrasi kearifan lokal dalam pelestarian laut: Studi kasus praktik konservasi berbasis budaya. *Jurnal Ekologi Sosial*, 9(1), 54–70.
- Pontoh, M. D. A. T., & Kabul, A. R. (2023). Kata serapan dari bahasa Hakka dalam leksikon bahasa Indonesia. *Semiotika: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*, 24(1), 55–66.
- Prabowo, T. (2021). Hambatan linguistik dalam implementasi kebijakan kelautan Indonesia. *Jurnal Linguistik dan Kebijakan Publik*, 3(2), 88–101.
- Pratikno, H., Musthafa, B., Rosenda, D., & Wulansari, A. (2021–2024). Penanda gramatikal sufiks serapan asing -at dalam proses pembentukan kata bahasa Indonesia. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 12(2), 150–165. <https://doi.org/10.26499/rnh.v12i2.7328>
- Raharjo, T., & Santoso, S. (2020). Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan lingkungan dalam bahasa Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pesisir*, 10(3), 112–124.
- Salma, N. F., Utari, F. A., Mareta, D. S., et al. (2024). Penggunaan kata serapan dalam konteks teknologi pangan: Tinjauan atas laporan praktikum 2023. *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia*, 5(1), 88–99.
- Santoso, H. (2020). Strategi komunikasi kebijakan berbasis bahasa lokal dalam konservasi sumber daya laut. *Jurnal Ilmu Politik Kelautan*, 6(1), 56–70.
- Setiawan, A., & Rahmawati, D. (2021). Pengaruh bahasa terhadap pemahaman kebijakan publik. *Jurnal Komunikasi Kebijakan*, 8(2), 45–57.
- Subhan, M. (2021). Pengaruh penggunaan istilah asing dalam dokumen kebijakan kelautan terhadap pemahaman masyarakat pesisir. *Jurnal Sosiolinguistik Maritim*, 5(1), 102–117.

- Sugiarti, Sundari, & Anggraeni, Y. (2023). Analisis kata serapan bahasa asing pada cerpen Kompas “Elisa Mengaku Kawin dengan Telepon Selulernya”. *Seulas Pinang: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 3(1), 34–43.
- Supriyadi, A. (2022). Analisis pemahaman masyarakat pesisir terhadap istilah teknis kelautan: Studi kasus di Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Pesisir dan Laut*, 7(2), 143–158.
- Susilawati, N., Marafad, L. O. S., & La Ino. (2023). Eksistensi leksikon bahasa Bajo bidang kelautan di Kecamatan Soropia: Kajian ekolinguistik. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 7(2), 115–126.
- Wahyuni, S., & Askar, A. (2022). Pengembangan glosarium dwibahasa istilah kelautan untuk masyarakat pesisir. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Maritim*, 5(2), 110–123.
- Widodo, B. (2023). Literasi kelautan dalam pembangunan berkelanjutan: Sebuah tantangan pendidikan di daerah pesisir. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 11(1), 66–80.